PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun oleh :
Tri Listiani
NIM. 14.0102.0140

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Tri Listiani
NIM.14.0102.0140

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018



SKRIPSI

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

Tri Lhilam

NPM 14.0102.0140

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 29 Agustus 2018

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Bambang Sudaryono, S.E., M.Si.

Pembimbing

Penguji

Lilik Andriyani, S.E., M.Si.

Ketua

Hadiah Sulastri, S.E., M.Si.

Sekretaris

Yulinda Dwi Pramita, S.E., M.Si.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal 22 SEP 2018

Dra. Marfuah Karsih, M.M.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:Tri Listiani
NIM	:14.0102.0140
Fakultas	:Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian dari pernyataan saya tidak benar,maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Agustus 2018

Pembuat Pern...



Tri Listiani

14.0102.0140

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Tri Listiani
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat,tanggal lahir	: Magelang, 13 Mei 1994
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Nambangan RT 02 RW 19 Magelang
Alamat Email	: trilistiani673@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2001-2006)	: SD Negeri Rejowinangun Utara 5
SMP (2006-2009)	: SMP Negeri 10 Magelang
SMA(2009-2012)	: SMK Negeri 2 Kota Magelang
PT (2012-2018)	: S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, Agustus 2018
Peneliti

Tri Listiani
NIM. 14.0102.0140

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Asy Syarh : 6-9)

Siapapun yang belum pernah membuat kekeliruan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru.
(Albert Einstein)

Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu membawa perubahan untuk hidup orang lain
(Michelle Obama)

Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung
(QS. Ali Imran :173)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah** (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini,penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak,oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Barkah Susanto, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Lilik Andriani, S.E., M.Si. selaku dosen penguji 1(satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
3. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc. selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Ayahanda, Ibu dan Kakak terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
6. Teman-teman akuntansi angkatan 2014, teman-teman KKN angkatan 45, terimakasih atas doa dan bantuan selama ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umunya.

Magelang, Agustus 2018
Peneliti

Tri Listiani
NPM. 14.0102.0140

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii
HALAMAN RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAKSI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 12
1. Teori Keagenan 12
2. Kualitas Laporan Keuangan 13
3. Sistem Informasi Akuntansi 14
4. Sistem Pengendalian Internal 17
5. Kompetensi Sumber Daya Manusia 19
6. Pemahaman Akuntansi 20

B. Penelitian Terdahulu 21
C. Perumusan Hipotesis 23
D. Model Penelitian 28
BAB III METODA PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel 29
B. Jenis dan Sumber Data 29
C. Teknik Pengumpulan Data 30
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 30
E. Metode Analisis Data 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sampel Penelitian 37
B. Statistik Diskriptif Responden 38
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 39
D. Uji Kualitas Data 41
E. Regresi Linier Berganda 44
F. Uji Hipotesis 45
G. Pembahasan 49
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 55
B. Keterbatasan Penelitian 56
C. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini LKPD Kota Magelang 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3.1 Variabel penelitian dan Definisi Operasional 30
Tabel 4.1 Sampel penelitian & Tingkat penelitian 37
Tabel 4.2 Profil Responden 38
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 39
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas 42
Tabel 4.5 *Cross Loading* 42
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 43
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi 44
Tabel 4.8 Nilai Koefisien Determinan (R^2) 45
Tabel 4.9 Nilai Analisis Uji F 46
Tabel 4.10 Nilai Analisis Uji t 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Trend Opini Pemeriksaan LKPD 3
Gambar 2.1 Model Penelitian 28
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F 35
Gambar 3.2 Penerimaaan Uji t..... 36
Gambar 4.1 Nilai kritis Uji F 46
Gambar 4.2 Nilai kritis Uji t 47
Gambar 4.3 Nilai kritis Uji t 48
Gambar 4.4 Nilai kritis Uji t 48
Gambar 4.5 Nilai krits Uji t 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Riset..... 61
Lampiran 2 Bukti Riset..... 62
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian 66
Lampiran 4 Daftar Sampel..... 73
Lampiran 5 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner 74
Lampiran 6 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner setelah validitas..... 84
Lampiran 7 Hasil uji Statistik Deskriptif..... 94
Lampiran 8 Hasil Uji Validitas..... 95
Lampiran 9 Hasil Uji Reliabilitas 101
Lampiran 10 Hasil Uji Regresi Analisis Berganda 102

ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMAHAMAN AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang)

Oleh :

Tri Listiani

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan fenomena meningkatnya opini LKPD di beberapa daerah selama 5 tahun terakhir. Fenomena tersebut menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memenuhi syarat-syarat laporan keuangan yang berkualitas. Kriteria pembentuk kualitas laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut diduga adalah pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman akuntansi. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD di Kota Magelang. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Selanjutnya untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntasi, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Sementara untuk variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang.

Kata kunci : ***Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2000 kepemerintahan yang baik yaitu kepemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, dan dapat diterima oleh seluruh rakyat. Akuntabilitas berarti bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksankan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyalurkan informasinya berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan dituntut memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Informasi yang disajikan oleh pemerintah digunakan oleh berbagai pihak untuk pengambilan keputusan, maka dari itu infomasi yang diberikan harus berkualitas. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah Indonesia kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan adalah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Pemerintah dalam mengelola keuangan, melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN atau APBD disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Untary & Ardiyanto, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaporkan satu tahun sekali dan akan mendapat opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah yang belum memenuhi standar akuntansi dan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik semakin meningkat. Laporan keuangan yang baik dapat dihasilkan dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik, pemanfaatan sistem informasi yang baik, pengendalian internal yang baik dan juga pemahaman akuntansi yang baik. Seiring banyaknya penyimpangan terhadap laporan keuangan pemerintah yang belum baik fenomena peningkatan opini laporan keuangan pemerintah daerah dari Wajar Dengan

Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian terjadi di beberapa LKPD di provinsi Jawa Tengah. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 terdapat 31 pemerintah daerah memperoleh opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2016 dan opini WDP sebanyak 5 pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP seperti di Kab.Batang yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2016, yang sebelumnya menyandang opini WDP dari tahun 2012-2015, begitu juga di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak yang mendapatkan opini WTP setelah sebelumnya mendapat opini WDP(www.bpk.go.id).



Gambar 1.1
Sumber : www.bpk.go.id

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit atas LKPD Kota Magelang selama lima tahun, dari tahun 2012-2016, BPK memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1

Tabel 1.1
Opini LKPD Kota Magelang tahun 2012-2016

LKPD (tahun)	OPINI
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WTP

Sumber : bpk.go.id

Laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang selama tahun 2012-2015 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2016 LKPD Kota Magelang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini merupakan suatu peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, serta mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup baik. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari usaha segenap pihak pemerintah daerah Kota Magelang yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan nilai informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan, yang ditempuh melalui berbagai cara, antara lain pemanfaatan teknologi informasi ke dalam proses pengelolaan keuangan daerah, serta pengawasan yang lebih intensif dari aparat pengawas fungsional daerah selain itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan dari hal-hal tersebut terdapat hubungan antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, serta pemahaman akuntansi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan dan itegrasi sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya yang lebih baik, efektif dan memadai serta peningkatan sarana dan prasarana, diharapkan dapat menunjang dan

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta menciptakan *good governance* (Pujiswara dkk, 2014).

Laporan keuangan pemerintah daerah terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan kualitas, salah satunya yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintahan yang juga mempunyai peran penting demi kualitas laporan keuangan yang baik. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu sistem informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing OPD dalam pnyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Yuliana, 2016).

Laporan keuangan yang penyusunannya berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa teknologi infomarsi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi perangkat lunak, *database*, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan sistem. Sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor lain dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Laporan keuangan yang bermanfaat memuat kapasitas sumber daya manusia harus sesuai dengan standar. Pemerintahan daerah dalam

menyusun laporan keuangan yang baik lebih banyak ditentukan oleh figur pemimpinnya daripada faktor-faktor lainnya. Pemerintah daerah untuk mendapatkan figur pemimpin yang baik tentu diperlukan sumber daya manusia yang baik. Pemerintah dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan hasil audit harus mendapat bantuan penuh dari manajamen organisasi, dewan komisaris, serta komite audit (Untary & Ardiyanto, 2015).

Sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian internal mampu membentuk struktur organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pemerintah daerah. Pemahaman standar akuntansi pemerintahan juga diperlukan agar hasil laporan keungan daerah lebih berkualitas.

Penelitian dari Yuliani dkk (2010) tentang Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keungan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh. Pemahaman akuntansi juga berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Tawaqal dan Suparno (2017) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi

Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan OPD di Kota Banda Aceh. Penelitian ini beranggapan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, penerapan sistem informasi akuntansi yang baik, sistem pengendalian internal yang baik maka waktu penyusunan laporan keuangan akan dapat dipersingkat.

Sedangkan penelitian dari Sukmaningrum dan Harto (2011) yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Semarang) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah, sistem pengendalian intern mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan faktor eksternal yang diproksikan dengan kemajuan IT berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dari Untary dan Ardiyanto (2015) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Faktor Eksternal sebagai Pemoderasi (Studi kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh

positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah sedangkan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh antara variabel sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengembangkan penelitan dari Untary dan Ardiyanto (2015). Perbedaan penelitian ini yaitu pertama, adanya penambahan variabel bebas yaitu pemahaman akuntansi, penambahan variabel ini dikarenakan laporan keuangan merupakan laporan yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, apabila pemahaman SAP pada sumber daya manusia semakin baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Kedua, obyek penelitian ini mengambil sampel pada OPD di Kota Magelang. Alasan pemilihan OPD Kota Magelang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, selama 4 tahun dari tahun 2012-2015 adalah WDP sedangakan pada tahun 2016 adalah WTP, sehingga apakah aspek aspek seperti pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman SAP berpengaruh terhadap peningkatan laporan keuangan Kota Magelang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Magelang).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang ?
2. Bagaimanakah pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang ?
3. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang ?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang ?

C. Tujuan Peneliti

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Magelang.
3. Menguji secara empiris dan menganalisi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang.
4. Menguji secara empiris dan menganalsisi pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan petimbangan dan memberikan pemahaman serta memperkaya wawasan mengenai sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi di pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

   a. Untuk penulis, penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

   b. Untuk pemerintahan, penelitian ini bisa digunakan sebagai kontribusi dalam penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

   c. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti yang mengambil judul sama dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori Keagenan

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal)* yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Teori keagenan merupakan perjanjian antara satu atau lebih prinsipal dengan agen. Teori keagenan merupakan perjanjian yang berisi proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan, untuk meminimalkan konflik tersebut dengan pihak ketiga dengan menggunakan auditor (Artana, 2016). Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan masalah keagenan, teori keagenan mempelajari hubungan antara agen dan prinsipal. Pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kepada masyarakat luas, dalam

hal ini bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi bagi masyarakat luas sebagai prinsipal. Teori keagenan merupakan teori yang dalam prakteknya terdapat kepentingan yang berbeda antara agen dan prinsipal, dalam pemerintahan untuk meminimalisir konflik, maka laporan keuangan adalah salah satu hal yang dapat meminimalkan konflik antara pemerintah dan masyarakat luas.

2. Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempnyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memnuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut (Nurillah, 2014). Pemerintah menyusun laporan keuangan ditujukkan untuk pengambilan keputusan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : KK-10) berpendapat bahwa karaktersitik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu

diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami.

1. Relevan yaitu apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu mengevaluasi dan mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
2. Andal keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode seelumnya .
4. Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Nurillah, 2014)

3. Sistem informasi akuntansi

Pemerintah dalam memaksimalkan akuntabilitas, peranan sistem informasi akuntansi adalah sangat penting, dalam mendukung kualitas laporan keuangan yang baik, sistem informasi akuntansi harus baik. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data

pengelolaan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagian bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yuliana, 2016).

Akuntansi pemerintah daerah yang biasa disebut akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Akuntansi pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi yaitu sistem desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambilan keputusan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Struktur pemerintah daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan yang dilakukan antara lain pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Dengan diberlakukannya sistem informasi akuntansi yang berbasis akrual, maka sistem informasi akuntansi sangat berperan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah yang baik, dan dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pedukung berupa teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak, *database*, jaringan dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 65 Tahun 2010 pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah dengan tujuan antara lain :

1. Membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan keuangan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan.
3. Membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah.
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah.
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, maka akses terhadap pengelolaan dan akses terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah perlu mengoptimalisasikan dalam penggunaan sistem informasi akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Rianisanti, 2017). Peggunaan teknologi informasi akan berdampak pada peningkatan dalam hal antara lain :

1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat
2. Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar.
3. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu.

4. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dan aksesibilitas lebih tinggi.
5. Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah.

Berdasarkan hal diatas bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah (Nurrilah, 2014). Sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik. Serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang baik dapat mendukung ketepatan laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Sistem pengendalian internal

Pengendalian internal adalah cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. *The Institute of Internal Audit* dalam Yuliani (2010) menyatakan bahwa internal audit adalah suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Nurillah, 2014). Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian internal akuntansi, berfungsi sebagai mencegah terjadinya inefesiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan organsasi dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh : adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian administratif, berfungsi untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijkan manajemen. Contoh : adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang digunakan agar informasi yang dihasilkan tepat dan akurat (Untary & Ardiyanto, 2015). Lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pengawasan

Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif. Sistem pegendalian internal merupakan proses yang dilakukan pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang, suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi sumber daya menurut Tjiptoherijanto dalam Rianisanti (2017) untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya tertuang dalam deskripsi tugasnya. Deskripsi tugas merupakan pembagian yang jelas sehingga sumber daya manusia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kompetensi sumber daya manusia dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan, dan ketrampilan. Kompetensi adalah karakterisitik pada seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjannya. Pegawai yang tidak mempunyai karakteristik yang memadai dalam pekerjaanya dapat membuat pemborosan waktu dan tenaga.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dalam usaha menciptakan visi dan misi dalam organisasi tersebut (Untary & Ardiyanto, 2015). Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, kualitas sumber daya manusia harus mempunyai kualitas yang baik, kualitas tersebut dapat terlihat dari latar belakang pendidikan akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang dapat menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.

6. Pemahaman Akuntansi

Akuntansi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiikhtisaran taransaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya serta penyajian laporan keuangan. Paham mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian di dalam pemerintahan bahwa pemahaman akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan sangat berperan, pemahaman akuntansi adalah paham tentang bagaiamana dalam menyusun laporan keuangan yang baik. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prisnsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pemahaman terhadap akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah juga sangat penting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah ke dalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan oleh masing-

masing OPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Artana, 2016).

B. Telaah penelitian sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1.	Mardiana dan Fahlevi, (2017)	Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual , kulitas laporan keuangan.	Pemahaman akuntansi, pengedalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.
2.	Tawaqal dan Suparno, (2017)	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah	Penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
3.	Kiranayanti dan Erawati, (2016)	Pemahaman sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual	Pengendalian internal sistem akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Yuliani dkk (2010)	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit.	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sisem akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Lanjutan

No	Peneliti	Variabel	Hasil penelitian
5.	Untary dan Ardiyanto (2015)	Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia	Sistem akuntansi,SPI, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terahadap kualitas laporan keuangan, sedangakan faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh anatara variabel SIA,SPI, dan kompetensi sumber daya manusia.
6.	Zuliarti (2012)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi	Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP,dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
7.	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi kapasitas SDM berpengaruh negatif.
8.	Sukmaningrum dan Harto (2011)	Kompetensi SDM, sistem pengendalian intern, kualitas laporan keuangan	Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor eksternal tidak memoderasi pengaruh kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan.

C. Perumusan Hipotesis

a. Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagian bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yuliana, 2016). Berkembangnya teknologi yang semakin maju, menuntut setiap orang dituntut terampil dalam pengelolaan teknologi. Pemerintah dalam tuntunanya dengan akuntabilitas publik akuntansi sektor publik terutama di dalam pemerintahan dituntut untuk memberikan kualitas laporan keuangan yang baik, berdasarkan hal tersebut sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang mendukung terwujudnya kualitas laporan keuangan pemerintahan yang tepat. Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyusunan laporan keuangan di era yang canggih seperti zaman sekarang. Sistem informasi membantu menyajikan data dengan cepat, sehingga pelaporan bisa dilaporkan secara tepat waktu.

Sistem Informasi yang semakin baik, maka baik pula penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah harus dapat mengoptimalisasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi guna mewujudkan sistem akuntansi yang terpadu, efektif dan efisien. Penelitian

yang dilakukan oleh Untary dan Ardiyanto (2015) menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi maka kualitas laporan keuangan juga akan semakin baik, sedangkan penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan, begitu juga penelitian dari Indriasari dan Nahartyo (2008) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

***H_1 : Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*.**

b. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi maksimalnya hasil audit terhadap kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal yang baik. Penyusunan laporan keuangan yang baik didukung dengan pengawasan internal yang baik pula. Sistem pengendalian internal sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai diharapkan dapat memberikan keyakinan, efektifan dalam kualitas laporan keuangan.

Keandalan pelaporan merupakan suatu hal yang penting dalam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang kurang baik dapat menyebabkan suatu penemuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan yang masih ditemukan penemuan-penemuan berarti belum dapat mendapatkan opini yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pemerintahan harus memperhatikan dalam sistem pengendalian internal agar mendapat laporan keuangan pemerintah yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2010) menyatakan bahwa pengendalian internal sangat berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keungan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Untary dan Ardiyanto (2015) juga menyatakan bahwa pengendalian internal juga berpengaruh positif terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

c. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kompetensi sumber daya merupakan salah satu hal penting di dalam organisasi. Sumber daya manusia adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan. Para staf dengan mengemban tugasnya sumber daya manusia harus terampil dan kompeten serta memiliki keahlian di dalam bidang akuntansi apabila sumber daya tersebut tidak cakap dalam mengemban tugasnya maka akan menimbulkan hambatan dalam proses pelaksanaan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dihasilkan oleh disiplin

ilmu akuntansi. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan harus mempunyai kompetensi sumber daya yang baik dan kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai pengetahuan akuntansi yang baik. Pengetahuan akuntansi yang baik akan menghasilakan laporan keuangan yang baik ataupun sebaliknya penyusunan laporan keuangan yang dilatarbelakangi dengan pengetahuan akuntansi yang buruk maka kualitas laporan keuangan akan menghasilkan penyusunan yang kurang baik pula. Penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012), Indriasari dan Nahartyo (2008), Sukmaningrum dan Harto (2011) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan penelitian Tawaqal dan Suparno (2017) dan Untary dan Ardiyanto (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan OPD. Semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula penyusuan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh posistif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuanan pemerintah daerah.

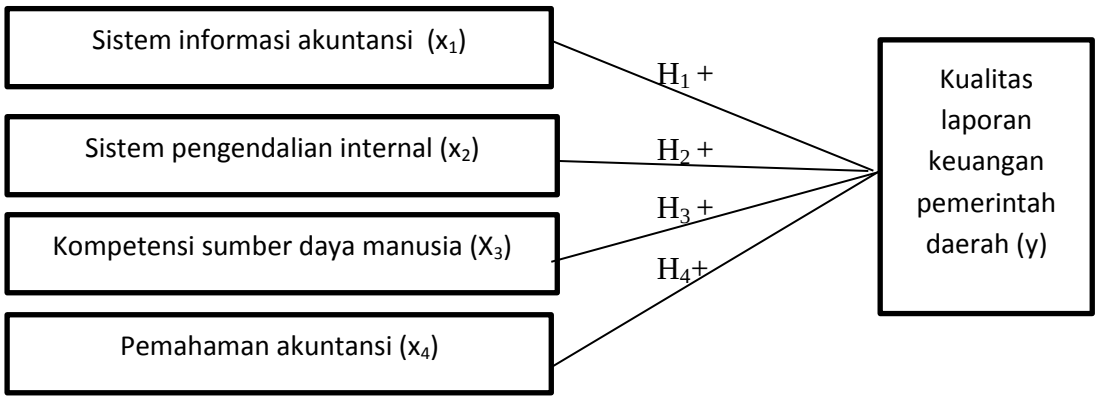
Teori keagenan menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban penyajian yang berkualitas harus didukung dengan pemahaman akuntansi yang baik bagi setiap staf dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus memahami bagaimana proses dan pelakasanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dkk (2010) dan penelitian Mardiana dan Fahlevi (2017) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemrintah daerah. Pemahaman akuntansi yang baik pada staf penyusunan laporan keuangan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_4: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Model Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dikemukakan diatas, maka dibuat kerangka konseptual untuk mempermudah hubungan antar variabel dan alur penelitian dengan model berikut:



Gambar 2.1
Model penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di Kota Magelang yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan inspektorat. Pola pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih satuan sampling atas dasar pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan dan akuntansi pada OPD. Alasan pemilihan responden adalah karena kepala bagian dan staf akuntansi bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan pada masing-masing OPD dan juga setiap bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah, karena terlibat langsung dan sangat memahami kegiatan akuntansi.

B. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung atas objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa kuesioner.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menyebar kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden. Kuesioner berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Hasil dari kuesioner dapat ditunggu sampai pengisian selesai, atau hasilnya dapat dijemput kembali sesuai kesepakatan antara peneliti dengan respoden.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi	Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.	1. Tingkat kecepatan 2. Tingkat kemanan 3. Tingkat efisiensi biaya 4. Tingkat kualitas hasil Diukur dengan menggunakan 4 pernyataan (Rianisanti, 2017) Skala *linkert* 1 sampai 5. 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

Tabel 3.1
Definisi Operasional
Lanjutan

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran
Sistem pengendalian internal	Sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern Diukur dengan menggunakan 7 pernyataan (Rianisanti, 2017) Skala *linkert* 1 sampai 5. 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.
Kompetensi sumber daya manusia	Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien	1. Kemampuan melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan 2. Kemampuan mencapai kinerja yang baik Diukur dengan menggunakan 5 pernyataan, (Rianisanti, 2017) Skala *linkert* 1 sampai 5. 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

Tabel 3.1
Definisi Operasional
Lanjutan

Variabel	Definisi operasional	Pengukuran
Pemahaman akuntansi	Pemahaman yaitu pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. (Kamus Umum Bahasa Indonesia)	1. Neraca 2. Penyajian laporan realisasi anggaran 3. Laporan arus kas 4. Penyajian CALK Diukur dengan menggunakan 4 pernyataan, (Artana, 2016) Skala *linkert* 1 sampai 5. 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.
Kualitas laporan keuangan pemerintah	Kualitas laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010)	1. Relevan a. Memiliki umpan balik b. Tepat waktu c. Lengkap 2. Andal a. Penyajian jujur b. Dapat diveifikasi c. Netralitas Diukur dengan menggunakan 6 pernyataan, (Artana, 2016) Skala *linkert* 1 sampai 5. 1= sangat tidak setuju sampai dengan 5 = sangat setuju.

E. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik desktiptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenjang pendidikan, tingkat jabatan, lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali, 2013)

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji ini digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013). Dalam menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatry Factor Analysis* (CFA). *Confirmatry Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai undimensional atau apakah indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel. Jika masing-masing indikator merupakan indikator pengukuran kontruk, maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran lebih dari satu terhadap gejala yang diukur dengan alat ukur yang sama. Pengukuran reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai α >0,70 (Ghozali, 2013).

3. Analisis Regresi Berganda

Model yang digunakan sebagai berikut:

$KLKPD = \alpha + \beta_1 SIA + \beta_2 SPI + \beta_3 KSDM + \beta_4 PA + e$

Keterangan :

KLKPD	= Kualits Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien
SIA	= Sistem Informasi Akuntansi
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
KSDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
PA	= Pemahaman Akuntansi
e	= *error*

4. Uji Hipotesis

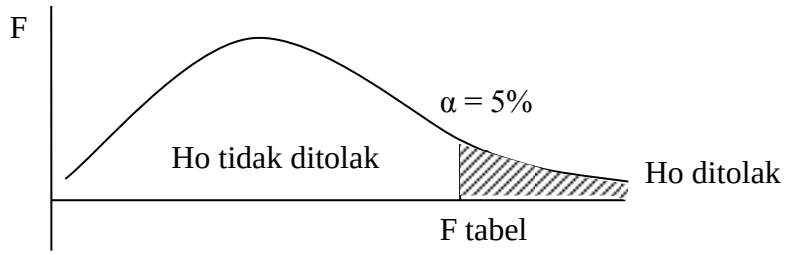
a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

b. Uji F *(Goodness of Fit Test)*

Uji F pada dasarnya dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoretis) (Ghozali, 2013). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df1) = k-1 dan derajat kebebasan penyebut (df2) = n-k, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

1) Jika F hitung > F tabel, atau *p value* < α = 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya model yang digunakan bagus atau (*fit*).
2) Jika F hitung < F tabel, atau *p value* > α = 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya model yang digunakan tidak bagus atau (tidak *fit*) (Ghozali, 2013).

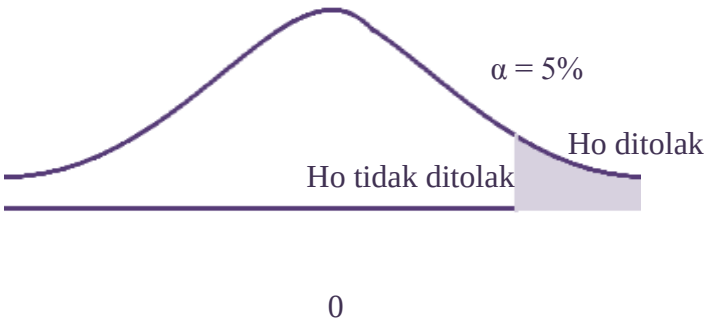


Gambar 3.1
Penerimaan Hipotesis Uji F

c. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Tujuan pengujian dengan uji t adaah untuk mengetahui koefisien regresi signifikan atau tidak, uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}. Menentukan t_{tabel} digunakan tingkat signifikasi 5% dengan derajat kebebasan df= n – 1. Kriteria pengujian adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan *pvalue*< 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan *pvalue*> 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi pada kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Magelang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 72 staf keuangan di OPD Kota Magelang.

Berdasarkan hasil uji t menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kualitas laporan keungan Kota Magelang, artinya semakin baik sistem pengendalian internal tidak dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Kota Magelang, artinya semakin baik kompetensi sumber daya manusia dan pemahaman akuntansi maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Kota Magelang.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui kuesioner.
2. Penelitian ini hanya meneliti sistem informasi akuntansi,sistem pengendalian internal,kompetensi sumber daya manusia, dan pemahaman akuntansi Hasil koefisien determinasi variabel independen tersebut belum bisa sepenuhnya menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penyebaran kuesioner dapat disertai dengan metode wawancara agar responden dapat lebih memahami pernyataan kuesioner sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menguji pengaruh variabel lain terhadap kualitas laporan keungan Kota Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

Artana, Arlia Sari. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi.* Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ghazali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriasari, D & Nahartyo, E. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal.*

Jensen, Michael.C, & W,H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics,3*, 305-360.

Kiranayanti, I.A.E & Erawati, N.M.A. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(2), 1290–1318.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005 : KK-10).

Mardiana, Rizki. & Heru Fahlevi. 2017. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal Dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *JIMEKA Vol. 2, No. 2, (2017) Halaman 30-38.*

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi & Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan,* Vol.2 No.1:1-17.

Nurillah, A.S. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (ketiga). Balai Pustaka: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Pujiswara, I. B., Herawati, N. T., & Kadek, N. S. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*, *2*(1).

Rianisanti, M. D. 2017. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Surakarta : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningrum, Tantriani & Puji Harto. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang).*Jurnal*

Tawaqal, Irzal & Suparno. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *(JIMEKA) Vol. 2, No. 4, (2017) Halaman 125-135*

Untary, Nurendah R, & Moh Didik A. 2015. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, *ejournal-s1 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015, Halaman 1 ISSN*.

Yuliana, Linna. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengalaman Kerja Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualiatas Laporan Keungan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas pendapatan

Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo). *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yuliani, S , Nadirsyah, & Usman, B. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, *3*(2), 206–220.

Zuliarti. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. *Jurnal*.

http://semarang.bpk.go.id/?page_id=9051 diakses pada 15 Mei 2018, jam 19.08